



PUTUSAN

Nomor 36 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMIRUDDIN S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE, tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Tande Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahman Yusuf, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/600-76.05/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 dan Nomor 37/600.76.05/II/2018, tanggal 9 Februari 2018;

Termohon Kasasi I;

II. 1. JAMALIA, BA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anoa Nomor 71 RT/RW 002/002, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Tene, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 36 K/TUN/2019



2. **JUFRI JALALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Rappocini RT/RW 001/006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **JUMRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selayar 2 Blok M Nomor 285 BSP RT/RW 001/014, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baharuddin S, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara Baharuddin S, S.H. & Rekan, Kantor Konsultasi Hukum yang berkantor pada DPD Kongres Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km.7 Nomor 63 Depan PLTU Tello Makassar, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia di Jalan Mustafa Dg. Bunga Lr.3, Nomor 5, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor 485/1985, tanggal 15

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 36 K/TUN/2019



Oktober 1985, luas 39.882 m², atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor 485/1985, tanggal 15 Oktober 1985, luas 39.882 m², atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang kepentingan gugatan Penggugat tidak terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 26 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/B/2018/PT.TUN MKS, tanggal 18 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2017/PTUN Mks, tanggal 26 April 2018;
- Mewajibkan atau menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 November 2018 dan 16 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 36 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya alas hak yang sah yang dimiliki oleh Penggugat terkait dengan bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya yang sebagian luasnya telah diterbitkan sertifikat objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMIRUDDIN S**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 36 K/TUN/2019



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

S.H., M.H.

Dewi Eliza Kusumaningrum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 36 K/TUN/2019